

Pengaruh *Good Government Governance*, Ukuran Legislatif, Ukuran Pemda, dan Leverage terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Muhammad Satria Aji¹, Dewi Amalia^{2*}

Akuntansi/Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

dewi.amalia@act.uad.ac.id

ABSTRACT

The performance of local governments is considered good when their constituents receive optimal services from the local government. The level of societal welfare can be assessed based on the absorption of the regional government's budget. The accountability of the local government reflects the level of public services and serves as an evaluation tool for the previous year's performance to guide improvements in the subsequent year's performance. This study investigates the factors that are presumed to influence the performance of local governments, including good government governance, legislative size, local government size, and leverage. The main objective of this research is to examine the effects of good government governance, legislative size, local government size, and leverage on the performance of local governments. This research used a quantitative approach and utilizes secondary data. The research sample consists of local governments in regencies and cities on the island of Sumatra for the years 2017 to 2021, selected through purposive sampling method. Data collection is conducted through documentation, and the data is analyzed using panel data regression analysis with the Eviews 12 software. The findings indicate that good government governance has a significant impact on the performance of local governments. However, legislative size, local government size, and leverage do not have a significant effect on the performance of local governments.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Kinerja pemerintah daerah; good government governance; ukuran legislatif; ukuran pemda; leverage

Kinerja pemerintah daerah dikatakan baik apabila masyarakatnya mendapatkan pelayanan secara maksimal dari pemerintah daerahnya. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari jumlah keterserapan anggaran pemerintah daerah tersebut. Pertanggung jawaban pemerintah daerah menunjukkan tingkat pelayanan masyarakat serta dan menjadi alat evaluasi kinerja tahun lalu guna dijadikan dasar pedoman dalam meningkatkan kinerja tahun selanjutnya. Faktor yang diduga mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dalam penelitian ini meliputi *good government governance*, ukuran legislatif, ukuran pemda, dan *leverage*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *good government governance*, ukuran legislatif, ukuran pemda, dan *leverage* terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Sampel penelitian meliputi pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Sumatera tahun 2017-2021 yang ditentukan menggunakan metoda purposive sampling. Teknik pengumpulan data pada

penelitian ini menggunakan dokumentasi, Teknik analisis data menggunakan regresi linier data panel dengan program *evIEWS 12*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *good government governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan ukuran legislatif, ukuran pemda, dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi kepentingan publik dalam menciptakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan juga mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Adanya otonomi daerah juga diharapkan pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya dan dapat menjalankan pemerintahannya dengan baik sehingga akan meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan dari otonomi daerah yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang baik serta maksimal. Masyarakat berhak menuntut pemerintah daerah supaya bekerja sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Upaya pemerintah daerah untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut yaitu dengan menjalankan tugasnya sesuai dengan visi dan misi pemerintahannya. Oleh karena itu, kinerja pemerintah daerah menjadi perhatian masyarakat dan masyarakat menilai capaian pelaksanaan program-program yang telah dilakukan oleh pemda. Tujuan dari penilaian tersebut yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintah daerah dalam pelayanan publik (Hutapea dan Widyaningsih, 2017).

Kinerja pemerintah daerah merupakan tingkat hasil pencapaian kinerja pemerintah daerah atas pelaksanaan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, visi, dan misi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat/publik. Upaya mewujudkan pelayanan publik kepada masyarakat, pemerintah daerah setiap tahunnya harus merencanakan, menyusun, dan melaksanakan seluruh kegiatan pendanaan yang sudah terangkum dan terencana dalam rencana keuangan tahunan berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan (Mongeri, 2013). Anggaran merupakan motor penggerak yang digunakan sebagai landasan pengeluaran dan penerimaan oleh pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari jumlah keterserapan anggaran pemerintah daerah. Noviwijaya dan Rohman (2013) menyatakan bahwa penyerapan anggaran sebagai proporsi anggaran satuan kerja yang telah direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Penyerapan anggaran pemerintah daerah yang rendah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Namun kenyataannya, anggaran pemerintah pusat dan daerah mengalami permasalahan yang sama setiap tahunnya, yaitu tingkat penyerapan anggaran yang rendah atau tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya (Hanif dan Suparno, 2017). Oleh karena itu, peneliti

melakukan penelitian tentang kinerja pemerintah daerah yang diukur menggunakan serapan anggaran. Variabel yang diduga berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah terdiri atas *good government governance*, ukuran legislatif, ukuran pemda, dan leverage.

Keberhasilan kinerja pemerintah daerah diduga dipengaruhi oleh penerapan *good government governance*. *Good government governance* merupakan tata kelola yang diterapkan untuk semua kegiatan publik agar pemerintah daerah mampu melaksanakan tugas secara efektif dan efisien sesuai dengan apa yang telah masyarakat harapkan (Ronanda dan Sulistiyowati, 2020). Keseimbangan antara tujuan pemerintahan dan tujuan masyarakat harus diselenggarakan melalui penerapan *good government governance*. Oleh karena itu diperlukan untuk menerapkan prinsip-prinsip *good government governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan keadilan (Pratolo, 2010). Gustianra dan Serly (2019) menyatakan bahwa *good government governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Peneliti menduga bahwa kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh ukuran legislatif. DPRD merupakan bentuk lembaga perwakilan rakyat daerah di tingkat provinsi/kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah (Sari, 2016). Penelitian Hutapea dan Widyaningsih (2017) menyatakan bahwa ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Ukuran pemda merupakan faktor yang juga diduga berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Ukuran pemda yang besar akan memberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan atau program yang sudah direncanakan guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Penelitian yang telah dilakukan oleh Kiswanto dan Fatmawati (2019) juga Aminah *et al.* (2019) menyatakan bahwa ukuran daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Faktor lain yang diduga berpengaruh atas kinerja pemerintah daerah adalah leverage. Leverage dijelaskan untuk melihat seberapa baik aset perusahaan dibiayai oleh utang dibandingkan dengan modal sendiri (Sambora *et al.*, 2014). Leverage yang tinggi menunjukkan bahwa aset didukung oleh utang yang relatif tinggi pula sehingga pemerintah dinilai tidak memiliki kinerja yang optimal. Hasil penelitian Kiswanto dan Fatwamati (2019) menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian Hutapea dan Widyaningsih (2017). Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel independen dan objek penelitian. Penelitian Hutapea dan Widyaningsih (2017) menguji tentang pengaruh *good government governance* dan ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan penelitian ini menambahkan 2 variabel independen menjadi *good government governance*, ukuran legislatif, ukuran pemda, dan leverage. Objek penelitian Hutapea dan Widyaningsih (2017) adalah pemerintah provinsi di Indonesia, sedangkan objek penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Pulau Sumatera.

Menurut Kemitraan (2022) menyatakan bahwa banyak terjadi korupsi serta kejahatan sumber daya alam di Pulau Sumatera. Hal ini semakin rumit dikarenakan melibatkan tokoh-tokoh yang berpengaruh, seperti kepala daerahnya sendiri. Pulau Sumatera merupakan pulau dengan penduduk terpadat ke dua setelah Pulau Jawa. Jika dibandingkan dengan Pulau Jawa, tingkat kemajuan pembangunan infrastruktur di Pulau Sumatera masih kalah, tetapi tidak menutup kemungkinan Pulau Sumatera akan terus meningkatkan pembangunannya guna meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan data dari Kementerian PUPR bahwa persentase jalan terbaik ada pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 99,84%. Hal itu menandakan bahwa

pembangunan di Pulau Sumatera tergolong baik. Pulau Sumatera juga menjadi penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Jika dilihat dari aspek ekonomi, maka hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga akan memberikan kontribusi untuk pembangunan daerah. Hal ini menjadi menarik untuk dicari informasi faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingginya kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Good Government Governance, Ukuran Legislatif, Ukuran Pemda, dan Leverage terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**”.

METODA PENELITIAN

Teknik Pengambilan Sampel

Populasi pada penelitian ini yaitu kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Sampel penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Pulau Sumatera yang ditentukan menggunakan metoda *purposive sampling* dengan kriteria berikut:

- a. Kabupaten dan kota di Pulau Sumatera pada periode 2017 - 2021.
- b. Kabupaten dan kota yang mempunyai kelengkapan data.

Defisini Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pasal 1 ayat (5) kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan. Pengukuran dalam kinerja pemerintah daerah ini menggunakan serapan anggaran yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran pada *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran belanja.

Kemampuan penyerapan anggaran dianggap baik dan berhasil apabila realisasi penyerapan anggaran sesuai dengan aktual fisik pekerjaan yang dapat diselesaikan, dengan anggapan bahwa fisik aktual pekerjaan tersebut relatif sama dengan target penyelesaian pekerjaan yang direncanakan (Zaenudinsyah, 2016). Variabel ini menggunakan perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran belanja x 100% yang diperoleh dari neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran ini telah digunakan sebelumnya pada penelitian Kiswanto dan Fatmawati (2019); Andani *et al.* (2019); dan Aminah *et al.* (2019).

2. Good Government Governance

Good government governance merupakan tata kelola yang diterapkan dalam semua kegiatan publik yang bertujuan agar pemerintah dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien serta sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik (Ronanda & Sulistiyowati, 2020). *Good government governance* diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan pemerintah dan masyarakat. Penerapan *good government governance* terdapat tantangan dalam memaksimalkan penciptaan kesejahteraan masyarakat sedemikian rupa sehingga tidak membebankan semua biaya kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu menerapkan prinsip-prinsip *good government governance* (Pratolo, 2010).

Pengukuran *good government governance* ini menggunakan skor dari Indeks Pelayanan Publik (IPP). Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk

mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di Indonesia. Oleh karena itu, indeks pelayanan publik memiliki pengaruh pada kinerja pemerintah daerah (Ahmad *et al.*, 2020). Pengukuran variabel ini diukur menggunakan skor yang diperoleh dari Indeks Pelayanan Publik. Ukuran Legislatif

Ukuran legislatif merupakan salah satu indikator penting dalam pengelolaan pemerintah. Ukuran legislatif diukur dengan seberapa besar jumlah DPRD yang memiliki tugas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan (Hutapea dan Widyaningsih, 2017). DPRD memiliki tugas pengawasan terhadap pemerintah daerah, sehingga berdampak terhadap kinerja pemerintah daerah. Anggota DPRD kabupaten/kota menjadi alat ukur dari variabel ukuran legislatif, karena dengan jumlah yang maksimal membuat pengawasan kepada pemerintah daerah yang juga menjadi maksimal (Gustianra dan Serly, 2019). Pengukuran ini telah dilakukan pada penelitian Hutapea dan Widyaningsih (2017); Gustianra dan Serly (2019).

3. Ukuran Pemda

Ukuran pemerintah daerah didefinisikan sebagai besar kecilnya objek dari pemerintah daerah (Noviyanti dan Kiswanto, 2016). Menurut Damanpour (1991) ukuran pemda adalah ukuran yang menunjukkan besar atau kecilnya pemerintahan daerah yang dapat diukur menggunakan total aset, total pendapatan, jumlah pegawai, dan tingkat produktivitas. Ukuran pemda yang besar akan memberikan kemudahan dalam kegiatan operasionalnya, dan akan mempermudah dalam melakukan pelayanan yang memadai bagi masyarakat (Kusumawardani, 2012). Variabel ukuran pemda diukur dengan total aset dalam neraca pemda (Kiswanto dan Fatmawati, 2019). Neraca pemda dapat diperoleh dari website www.bpk.go.id dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran variabel ini telah digunakan pada penelitian Kiswanto dan Fatmawati (2019); Aminah *et al.* (2019); serta Kusumawardani (2012).

4. Leverage

Leverage pada sektor publik digunakan kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar hutangnya (Kiswanto & Fatmawati, 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian Artha *et al* (2015) mengemukakan bahwa *leverage* sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit.

Leverage adalah rasio antara total utang dengan total aset yang dinyatakan dalam presentase (Harjito dan Martono, 2011: 59). Pengukuran *leverage* pada penelitian ini menggunakan perbandingan antara utang dan ekuitas yang dapat diperoleh dari neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran leverage ini telah dilakukan dalam penelitian Kiswanto dan Fatmawati (2019); Saraswati dan Rioni (2019); Sesotyningtyas (2012).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi data panel Data panel merupakan data yang terdiri dari data cross section dan time series yang disatukan dalam proses pengolahan data. Alat analisis penelitian ini menggunakan metode statistik menggunakan alat analisis program *eviews 12*. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah analisis regresi data panel dengan persamaan:

$$Y = a + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e$$

Keterangan

Y = Kinerja Pemerintah Daerah

- a = Konstanta
- β = Koefisien Regresi
- i = *Cross Section*
- t = Periode Waktu
- X_1 = *Good Government Governance*
- X_2 = Ukuran Legislatif
- X_3 = Ukuran Pemda
- X_4 = *Leverage*
- e = *Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Deskriptif

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	Kinerja	GGG	Uk Legislatif	Uk Pemda	Leverage
Mean	0,9336	3,4755	34,8958	28,6165	0,0186
Maximum	1,1560	4,6500	50,0000	31,1740	0,1994
Minimum	0,6450	1,6500	20,0000	25,6140	5,00E-05
Std. Dev.	0,0795	0,6454	9,3115	0,7531	0,2617

Sumber: Data sekunder, diolah (2023)

Berdasar data yang disajikan pada Tabel 1 diketahui bahwa nilai deviasi standar masing-masing variabel menunjukkan nilai yang lebih kecil dari nilai mean. Dengan demikian data dalam penelitian ini kurang bervariasi atau homogen.

Analisis Regresi Data Panel

Peneliti melakukan pengujian menggunakan uji Chow dan Hausman untuk memilih model regresi data panel dalam pengujian hipotesis. Hasil pengujian tersebut menunjukkan hasil bahwa analisis didasarkan pada *fixed effect model* seperti yang tersaji dalam Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Hasil Uji Analisis Regresi Data Panel

Variabel	B	α	P value	Keterangan
C	0,8171	0,05	0,0758	
GGG	-0,0514	0,05	0,0000	H1 didukung
Uk Legislatif	-0,0006	0,05	0,4040	H2 tidak didukung
Uk Pemda	0,0113	0,05	0,4803	H3 tidak didukung
Leverage	-0,3725	0,05	0,2305	H4 tidak didukung
Variabel dependen: Kinerja Pemerintah Daerah				
<i>Adjusted R squared</i> : 0,3941				
<i>F statistic</i> : 3,8268				
Probabilitas (<i>F statistic</i>): 0,000				

Sumber: Data sekunder, diolah (2023)

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai *adjusted R-squared* sebesar 0,3941. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri atas GGG, ukuran legislatif, ukuran pemda, dan leverage dalam mempengaruhi variabel dependen sebesar 39,41%. Sedangkan sisanya sebesar 60,59% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Hasil pengujian pada Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai F sebesar 3,8268 dengan nilai signifikansi sebesar $0,0000 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa minimal terdapat satu variabel independen yang terdiri atas *good government governance*, ukuran legislatif, ukuran pemda, dan leverage secara simultan berpengaruh terhadap variabel kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa variabel *good government governance* diperoleh bahwa nilai t-statistik sebesar -5,081900 dan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < \alpha$. Hal ini menunjukkan bahwa H1 dapat didukung yang artinya *good government governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Variabel ukuran legislatif diperoleh bahwa nilai t-statistik sebesar -0,8364 dan nilai probabilitas sebesar $0,4040 > \alpha$. Dengan demikian hipotesis dua dalam penelitian ini tidak dapat didukung. Artinya ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Variabel ukuran pemda diperoleh bahwa nilai t-statistik sebesar 0,7072 dan nilai probabilitas sebesar $0,4803 > \alpha$. Oleh karena itu hipotesis 3 dalam penelitian ini tidak dapat didukung dan bermakna bahwa ukuran pemda tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Variabel *leverage* diperoleh bahwa nilai t-statistik sebesar -1,2031 dan nilai probabilitas sebesar $0,2305 > \alpha$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 4 tidak terdukung dalam penelitian ini. Oleh karena itu, leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh *Good Government Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian data, penelitian ini menunjukkan bahwa *good government governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah sehingga H1 terdukung. Pemerintah daerah merupakan penyelenggara semua urusan pemerintahan, pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat merupakan sebuah cerminan prestasi yang telah dilakukan dalam membangun dan mengelola roda perekonomian daerahnya. *Good government governance* merupakan tata kelola yang baik pada suatu organisasi atau perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* yang memandang bahwa *steward* (pemerintah) lebih mementingkan kepentingan masyarakat sebagai *principal*. Apabila tata kelola pemerintahan dikelola dengan baik, maka kinerja pemerintah akan baik pula sehingga kepercayaan masyarakat akan meningkat kepada pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hutapea dan Widyaningsih (2017) serta Gustianra dan Serly (2019).

Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil pengujian membuktikan bahwa ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dan H2 tidak didukung. Berarti banyak atau sedikitnya jumlah anggota DPRD pada kabupaten/kota tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan oleh anggota dewan telah berjalan dengan baik. Semakin mudahnya masyarakat dalam mengakses informasi juga ikut serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan daerah. Sinergi yang baik dari masyarakat, legislatif, dan eksekutif ini mendukung kinerja pemerintah ke arah yang semakin baik dan optimal. Hasil penelitian ini didukung oleh Anggraini *et al.* (2019).

Pengaruh Ukuran Pemda terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Ukuran pemda dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dan H3 tidak terdukung. Berarti tinggi atau rendahnya aset sebagai ukuran pemda tidak mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah telah berupaya optimal dalam pengelolaan aset yang dimiliki. Aset yang dimiliki digunakan sebaik mungkin dalam memenuhi kepentingan publik atau masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Anggraeni *et al* (2019).

Pengaruh Leverage terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah sehingga H4 tidak terdukung. Hal ini mengindikasikan bahwa pemda hanya sedikit menggunakan *leverage* sebagai sumber pendanaan, dan itupun bukan untuk kegiatan operasional pemerintahan (Sesotyanyingtyas, 2012). Hasil ini sejalan dengan penelitian Kiswanto dan Fatmawati (2019); Anggraini *et al.* (2019); serta Sundari dan Arza (2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pengujian data dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *good government governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan variabel ukuran legislatif, ukuran pemda, dan leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Saran untuk penelitian yang akan datang sebaiknya memperluas objek penelitian agar hasil penelitian lebih dapat digeneralisasi. Penelitian sejenis selanjutnya juga dapat menambahkan variabel penelitian karakteristik pemerintah daerah yang diduga dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, seperti *intergovernmental revenue* (Aminah *et al.*, 2019) dan tingkat kekayaan daerah (Anggraini *et al.*, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Haerani, S., & Umar, F. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, dan Kompetensi, Melalui Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pelayanan Publik. *Jurnal Mirai Management*, 2597-4084.
- Aminah, I. N., Afiah, N. N., & Pratama, A. (2019). Pengaruh Size, Wealth, Intergovernmental Revenue dan Belanja Modal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Sikap*, 3(2) 147-165.
- Anggraini, L., Rahayu, S., & Junaidi. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jambi). *Universitas Jambi*, 4(1), 45-56.
- Artha, R. D., Basuki, P., & Alamsyah. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB). *Jurnal InFesrasi*, 11(2), 214-229.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Gustianra, V., & Serly, V. (2019). Pengaruh Good Government Governance dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1426-1442.
- Hanif, I., & Suparno. (2017). Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran dan Fiscal Stress terhadap Serapan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 107-115.
- Harjito, A., & Martono. (2011). *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Hutapea, F. L., & Widyaningsih, A. (2017). Pengaruh Good Government Governance dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia). *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 9(1), 173-186.
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231-246.
- Kiswanto, & Fatmawati, D. (2019). Determinan Kinerja Pemerintah Daerah: Ukuran Pemda, Leverage, Temuan Audit dan Tindak Lanjutnya. *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol 3(1), 2019, 44-54, 44-54.
- Mongeri, M. (2013). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 66(1997), 1-24.
- Noviyanti, N. A., & Kiswanto. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5(1), 1-10.
- Pratolo, S. (2010). Peran Good Government Governance Untuk Mewujudkan Kinerja Pemerintahan Daerah dan Kepuasan Masyarakat di Era Otonomi Daerah dalam Menghadapi Tantangan Global, *Academia*, 1-10.
- Ronanda, F. H., & Sulistiyowati, F. (2020). Good Government Governance dan Kualitas Anggaran. *Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas*, 3(1), 50-68.
- Sambora, M. N., Handayani, S. R., & Rahayu, S. M. (2014). Pengaruh Leverage dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Sari, I. P. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota Pulau Sumatra). *JOM Fekon*, 3(1), 679-692.

- Sari, N. M., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen*, 8(8), 4759-4787.
- Sesotyaningtyas, M. (2012). Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 1(1), 1-6.
- Sundari, N., & Arza, F. I. (2021). Pengaruh Faktor Keuangan dan Non Keuangan terhadap Kinerja Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 8(1), 218-232.
- Zaenudinsyah, F. (2016). Analisis Faktor Penyebab Penumpukan Pencairan Dana APBN pada Akhir Tahun Anggaran. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 67-83.